

MEMBANGKITKAN KOPERASI PEMBIAYAAN EKONOMI KELURAHAN (KPEK) SEBAGAI UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA BOGOR BERBASIS DIGITAL.

Abdul Karim Halim¹⁾, Bahagia²⁾, Ani Safitri³⁾,
Renea Shinta Aminda⁴⁾, Imas Nurhayati⁵⁾.

UNIVERSITAS IBNU KHALDUN BOGOR

karim.halim@uika-bogor.ac.id,

ABSTRAK

Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan (KPEK) yang hanya ada di Kota Bogor, adalah lembaga ekonomi kerakyatan yang merupakan kumpulan modal bersifat finansial dan sosial. Sebagai soko guru ekonomi masyarakat Indonesia, Koperasi selayaknya dihidupkan oleh warga yang membutuhkan dengan memanfaatkan tabungan dari orang-orang yang punya uang, kemauan dan kepedulian untuk saling tolong menolong. Sejak awal pendiriannya KPEK dirancang untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil (syari'ah), oleh karena itu PINBUK menggandeng Koperasi *Baytul Maal wat Tamwil (KBMT)* untuk menjadi pendamping para pelaku UMKM dan Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan. Dalam awal operasionalnya KPEK juga dibantu permodalannya melalui program-program *Blockgrand* dari Dinas dan Instansi di Kota Bogor. Pada saat ini Pemerintah Kota Bogor berharap KPEK yang pernah berpartisipasi aktif mengentaskan angka kemiskinan di Kota Bogor, namun kondisi sebagian besar KPEK hidup segan mati tak mau, dibangkitkan kembali dengan sedikit mengubah paradigma ketergantungan kepada Pemerintah Kota, KPEK akan tetap menjadi mitra strategis Pemda dalam memberdayakan masyarakat Kota Bogor, yang diawali dengan Pelatihan dan pemberdayaan untuk penguatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaannya yang berbasis teknologi informasi dan komputer.

Kata Kunci : Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan.

I. PENDAHULUAN

Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan, mulai dirintis oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) – ICMI Orwilsus Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2000. Dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang baru bergabung dengan Kota Bogor sebagai konsekuensi dari Perluasan Wilayah Kota Bogor menjadi enam kecamatan dengan 68 desa/kelurahan. Terdapat beberapa desa yang berasal dari Kabupaten, dan awalnya merupakan desa binaan proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT) menggugah Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pendampingan khusus dengan menerjunkan para pendamping

dari PINBUK bersama kelengkapannya. Iswara dalam Abdul Kari Halim (2006 : 4) melaporkan “Pada tahun 2000/2001 tingkat kemiskinan di Kota Bogor mencapai 32. 255 KK (19,5 %), tetapi dapat diturunkan menjadi 16.355 KK (10,36 %) pada tahun 2003/2004”.

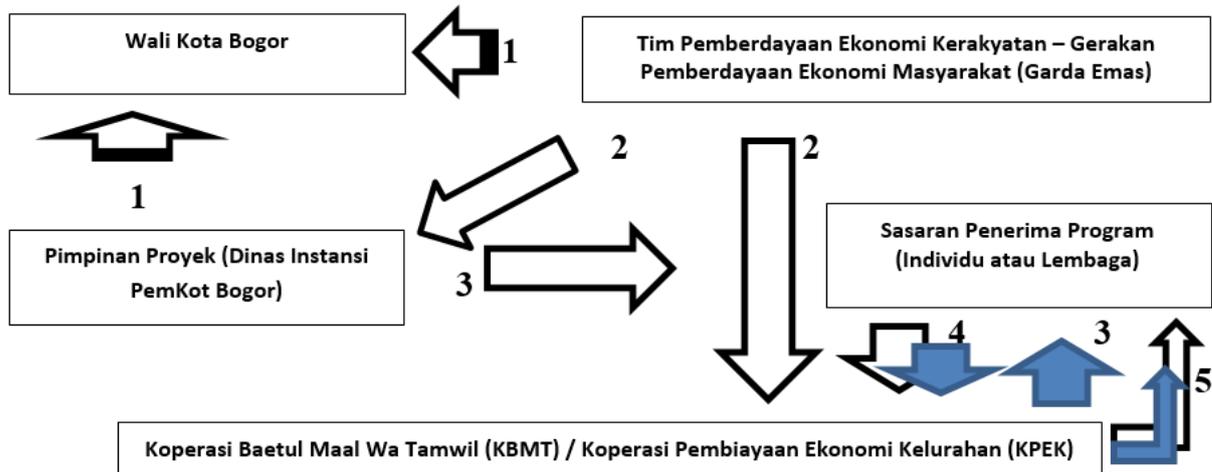
PINBUK Kota Bogor bersama dengan sayap organisasinya Koperasi Baitul Maal Wat tamwil (KBMT) mulai melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan, yang mengacu pada konsep Irwin T Sanders (D. Sudjana, 2010 : 403) bahwa: “Untuk mengembangkan masyarakat (*Communiy Development*), dibutuhkan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Economic Development*) yang dipadukan dengan pemberdayaan kelembagaan/

organisasi masyarakat (*Community Organization*)”. Atas dasar konsep tersebut, maka dicetuskanlah Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas), dengan membangun LPED (Lembaga Pembiayaan Ekonomi Desa) yang kemudian dibanhukumkan dengan bantuan dana dari Pemerintah Kota Bogor menjadi Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan (KPEK) pada tahun 2001. Penggunaan kata Pembiayaan karena dalam sistem ekonomi syariat yang berkembang saat itu, setiap kerjasama permodalan transaksinya disebut pembiayaan bukan pinjaman seperti layaknya pada sistem ekonomi konvensional. Abdul Karim Halim (2016 : 73) mengatakan “KPEK merupakan mitra paling depan dari pada Pemerintah Kota Bogor dalam menyalurkan berbagai Proyek Dinas Instansi di Kota Bogor yang pada awalnya hanya merupakan *Charity* atau *Blokgrand* (Bantuan Sosial) diubah menjadi pola bergulir sebagaimana sistem *Revolving Fund* yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh bersama *Grameen Bank* pada tahun 1980-an”.

Pelaksanaan pengguliran dana *Blok Grand* atau *charity* (bantuan sosial) dari instansi Pemerintah Kota Bogor, tidak mengubah atau mengurangi makna bantuan itu sendiri, tetapi dalam rangka memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, dengan membiasakan diri saling membantu sesama anggota masyarakat melalui pengelolaan dana bergulir (*revolving fund*). Untuk mengelola dana yang cukup besar ini Pemerintah Kota Bogor memerlukan pendamping masyarakat, yang kemudian atas kesepatan bersama ditunjuklah Koperasi *Baytul Maal Wat tamwil* sebagai lembaga *chanelling* di tingkat Kecamatan yang bertugas mendampingi Pengelola KPEK yang

menjadi Pengelola dana *Blokgrand* dari beberapa Dinas Instansi di Kota Bogor (↪) Bagi mereka yang mendapatkan guliran dana ke dua kali dan selanjutnya (↪), tidak lagi mendapatkan dana dari proyek dinas instansi tetapi dari dana masyarakat yang bergulir dan tersimpan di KPEK/KBMT, bila dana Di KPEK/BMT tidak mencukupi maka KPEK/KBMT dapat mengajukan pembiayaan ke Bank Pasar (BPR Kota Bogor), yang juga dilibatkan untuk melakukan pendampingan manajemen usaha/keuangan.

Dalam praktik usaha selanjutnya KPEK/KBMT tidak hanya mengelola Usaha Simpan Pinjam, tetapi juga usaha sektor riil, seperti menyediakan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan para anggota/keompok binaan, dan dapat melayani kebutuhan masyarakat bukan anggota yang berbelanja pada usaha sektor riil, misalnya di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan, banyak perajin sepatu sandal yang memerlukan bahan baku untuk produk usahanya, mereka dapat melakukan permemintaan pengadaan bahan baku, seperti kulit imitasi, gesper, lem dan kebutuhan lainnya ke KPEK/KBMT dan tentu saja dengan perlakuan yang berbeda dengan anggota KPEK/KBMT. Mereka dapat mengajukan pembiayaan dengan akad syari’ah. Wawan Sukmawan (2015;136-137), menjelaskan : “Jenis-jenis akad pembiayaan syari’ah, meliputi *Musyarokah, Mudhorobah, Wakalah, Kafalah, Ijaroh, Qordul Hasan*. dll”. Sistem Manajemen alur pembiayaan *Blockgrand* itu sendiri dikomando langsung oleh Wali Kota Bogor dengan membentuk Tim Garda Emas, dengan Pola Guliran Dana Selama/Pasca Proyek Tahun Anggaran Berjalan, sebagai berikut:



Gambar 1
Pola Guliran Dana Selama Proyek Tahun Anggaran Berjalan
dan Pola Guliran Dana Pasca Proyek Th. Anggaran.
 (Abdul Karim Halim, 2006 : 68 - 69)

Keterangan : 1. Pertanggung Jawaban. 2. Supervisi, Konsultasi, Pengarahan.
 3. Arus Guliran. 4. Angsuran. 5. Supervisi, Bimbingan Teknis.

Dana *Blockgrand* sebelum dikelola oleh Tim Garda Emas, setelah sampai kepada masyarakat dengan bukti Surat Tanda Bukti Penerimaan dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Bogor (Pimpinan Proyek), pembinaannya diserahkan kepada pihak Kelurahan dan Monitoring-Evaluasinya menjadi tanggung jawab Dinas Instansi terkait. Dinas Instansi sudah dapat mempertanggungjawabkannya kepada Inspektorat atau lembaga pemeriksa keuangan dengan menyerahkan kuitansi (Bukti Penerimaan) dana/proyek dari masyarakat/kelompok sasaran. Setelah dana *Blockgrand* diterima oleh masyarakat, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

Kelemahan dari sistem yang berlaku saat itu adalah pemerintah kesulitan melakukan pengontrolan langsung kepada masyarakat pengguna dana proyek. Dari pengalaman yang sudah berlalu dan sering terjadi di masyarakat, proyek-proyek seperti ini kecenderungannya gagal dan tak berkelanjutan, bahkan tak berbekas. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa dana yang berasal dari pemerintah tidak perlu

dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat sebagian kecil masyarakat yang tidak disiplin dan memiliki komitmen yang rendah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan proyek yang digulirkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membangkitkan dan mengembangkan usaha mereka, demi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Suatu penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan dana Jaringan Pengaman Sosial adalah 70% dari dana tersebut digunakan oleh para suami untuk belanja Rokok. Untuk menghindari kasus-kasus ketidaktepatan sasaran dan penggunaan bantuan dana *blockgrand* seperti itulah kami sepakat menyalurkan dana-dana proyek dari Dinas Instansi di Kota Bogor dengan sistem *Revolving fund* (bergulir), sehingga dana yang digulirkan menjadi tetap utuh bahkan dalam jangka waktu tertentu akan dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat lainnya. Perguliran dana *blockgrand* dari dinas instansi tidak seluruhnya *charity* (bantuan sosial), akan tetapi terdapat dana yang bergulir dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), tergantung keluarga dari kelompok sosial mana mereka berasal. Abdul Karim

Halim (2006:70) mengatakan “Untuk mereka yang berasal dari Keluarga Miskin (Keluarga Pra Sejahtera) dan Keluarga Sejahtera satu), mereka dipastikan akan mendapatkan dana guliran dengan nisbah bagi hasil nol persen (0 %), artinya mereka hanya wajib mengembalikan modal pokok dalam jangka waktu tertentu, yang dikelola secara berkelompok”. Di sini Pemerintah Kota meminta bantuan Pengelola KBMT dan KPEK untuk melakukan pembinaan Kewirausahaan sosial para pelaku Usaha Mikro. Selanjutnya Abdul Karim Halim (2006:72), menjelaskan: “Pinjaman mereka pada umumnya sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus Ribu Rupiah) dengan waktu pengembalian selama 120 hari, 20 hari pertama merupakan *grace period* (waktu senggang untuk tidak mencicil dahulu) dan mereka akan mulai mencicil pada hari ke-21 sampai dengan hari ke-100”. Pola seperti ini dilakukan dengan sistem usaha kelompok, sehingga mereka dapat bekerjasama dalam mengelola usaha, misalnya dalam melunasi cicilan kepada KBMT/KPEK, dilakukan dengan pola *tanggung renteng* (tanggung jawab bersama, saling tolong menolong dalam kebaikan). KPEK/KBMT akan melakukan pengambilan cicilan 1 (satu) kali dalam satu minggu, dengan mendatangi kelompok mereka sambil melakukan pembinaan, sementara mereka membayarkan cicilannya setiap hari kepada ketua kelompok.

Pada saat pengembalian mingguan tersebut, pendamping dari KPEK/BMT melakukan pembinaan. Pada kesempatan ini pula ada ajakan untuk menabung dalam jumlah antara Rp1.000,00 sampai dengan Rp2.000,00 dan berinfak seikhlasnya. Dana Infaq ini akan dibukukan oleh pendamping KBMT/KPEK sebagai dana *Maal*. Mereka yang sudah melunasi cicilan guliran dana tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan guliran kembali manakala masih membutuhkan, dengan besaran yang mungkin tetap atau bahkan lebih, tergantung pada hasil kajian pendamping dari KPEK/KBMT terhadap kemajuan usaha mereka.

Kelompok masyarakat kedua yang akan mendapatkan guliran dana *blockgrand* ini adalah mereka yang bukan dari keluarga miskin, petani atau pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), dengan status sebagai Keluarga Sejahtera dua (tidak miskin). Kelompok ini akan mendapat guliran dana berkisar antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 atau tergantung pada nilai proyek dinas instansi, mereka tetap berada dalam kelompok usaha/kelompok tani yang mendapat pendamping perguliran dana dari KPEK/KBMT dan bimbingan teknis dari dinas instansi terkait yang mengeluarkan guliran dana, misal dari Dinas Pertanian untuk program ketahanan pangan, Dinas Koperasi dan UKM untuk program Pembinaan Usaha Kecil Menengah, bantuan modal untuk pedagang kali lima dan lain-lain.

**Gambar 2**

Kegiatan Tim Pengabdian bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Tim Coaching Clinic, Mahasiswa KKN, Pengurus KPEK dan Mahasiswa KKN.

Pran PINBUK dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak secara langsung membina anggota KPEK/KBMT, melainkan melakukan pembinaan kepada KPEK/KBMT selaku pengelola dana atau melakukan pembinaan teknis usaha serta keterampilan hidup/keterampilan usaha masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, seperti pelatihan Sistem Mutu ISO 9001 untuk sektor Usaha Kecil. Program ini dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Standarisasi Mutu-LIPI. Program lainnya adalah Program Tangkal Penganggur, untuk mereka yang terkena dampak krisis moneter tahun 1998 (PHK) yaitu pelatihan usaha budi daya jamur tiram, ternak cacing, ternak jangkrik, ternak lele, ternak domba, dan lain-lain.

Pendampingan usaha kepada para pelaku UMKM dan masyarakat miskin itu tidak semudah membalikkan tangan, membutuhkan kerjasama Pemerintah dan organisasi nirlaba yang lebih banyak memahami kondisi serta karakter masyarakat setempat. Banyak hambatan yang kami hadapi dalam melakukan pendampingan kepada mereka, di antaranya;

1. Motivasi usaha yang rendah, menyerahkan diri kepada nasib dan takdir.
2. Memiliki anggapan bahwa setiap dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun merupakan bantuan sosial (*charity*), yang boleh mereka habiskan tanpa harus mengembalikan (gulirkan) agar dapat membantu sesama keluarga miskin lainnya.
3. Tingkat kejujuran masyarakat kita masih sangat rendah, sehingga membutuhkan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, sekali pun mereka sudah tidak termasuk keluarga miskin dan/atau usahanya menjadi lebih maju dari sekedar UMKM atau UKM.
4. Ada kesalahan persepsi dari sebagian pengurus KPEK tentang sistem bagi hasil. Mereka memahaminya bahwa seluruh pembiayaan syari'ah yang mereka berikan kepada mitranya, tidak diperlukan adanya margin bagi hasil atau dengan margin 0 (nol) persen, mereka tidak mengenal jenis pembiayaan

syariah, semua dianggap *qordul hasan* (bantuan kebajikan), sebagaimana mereka berikan kepada keluarga miskin.

5. Menganggap prosedur yang diterapkan oleh KBMT/KPEK rumit, lamban dan bertele-tele, maka mereka lebih banyak yang memilih bank keliling, rentenir yang dikenal dengan *Bank Emok*. Dengan persyaratan cukup foto copy Kartu Tanda Penduduk, tak perlu persetujuan suami/istri, pinjaman langsung cair dalam waktu tidak kurang dari 15 menit, masyarakat kita lebih suka dengan proses yang instan.

Faktor inilah yang menjadi penyebab tingginya risiko kemacetan cicilan yang pada akhirnya tidak dapat kembali sama sekali, bahkan tidak sedikit menyebabkan lembaga pemberi kredit seperti KBMT/KPEK gulung tikar, terlebih lagi ketika pendampingan manajemen kepada KPEK/KBMT tidak dilakukan oleh lembaga yang berkompeten. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor tidak dapat dikategorikan Wajar Tanpa Pengecualian, sebab telah melakukan kesalahan dengan menggulirkan dana yang sudah dinyatakan *Blockgrand (Charity)*. Terlebih sebagian dana yang digulirkan tersebut mengalami kemacetan dan tidak tercatat dalam buku keuangan Pemerintah Kota sehingga KPEK/KBMT kesulitan untuk menarik dana yang menyebar dan macet di masyarakat, sementara Pemerintah Kota pun tidak dapat serta merta menghapuskan dana

yang macet di masyarakat. Beberapa faktor inilah yang menjadi penyebab dihentikannya program pendampingan kepada KPEK/KBMT, dan kerjasama antara PINBUK dengan Pemerintah Kota Bogor dihentikan pada akhir tahun 2006.

II. METODE

Mengawali keseluruhan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan penguatan Sumber Daya Manusia pengelola KPEK dan penguatan pada kelembagaan koperasinya adalah dengan melakukan refleksi atas perjalanan KPEK yang pernah berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Bogor. Kemudian melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi KPEK oleh Tim *Coaching Clinic* dan Mahasiswa KKN. Untuk melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang kami temukan yang berhubungan langsung dengan kondisi KPEK, kami melanjutkannya dengan kegiatan curah pendapat bersama para pengurus KPEK dan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, serta Tim *Coaching Clinic*, serta rencana tindak lanjut dari hasil temuan bersama, berupa Pelatihan dan Pendampingan. Perjalanan untuk membangkitkan kembali KPEK menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bogor, tersusun dalam sebuah skema (gambar 2) berikut ini:



Gambar 2.
Prosedur Program Pengabdian.

Dari Gambar 2 tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini diawali dengan refleksi masa lalu KPEK yang pada tahun 2001 – 2005 pernah berperan serta aktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Bogor, dari 19,5 % (Thn 2000/2001) menjadi 10,36 % (Thn 2003/2004)
2. Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi 68 KPEK, saat ini pada 25 KPEK yang menjadi sampel. Setelah kurang lebih 10 tahun mengalami kemunduran dan tidak mendapatkan pendampingan yang layak. Tim *Coaching Clinic* dari LPPM UIKA melakukan Analisis SWOT. Imas Nurhayati & Titing Suharti (2022 : 29) mengatakan: “Dari hasil Analisis SWOT tersebut didapat informasi tentang Kekuatan dan Kelemahan serta Peluang dan Ancaman yang dimiliki dan dihadapi”.
3. Tim *Coaching Clinic* LPPM–UIKA melakukan analisis terhadap berbagai faktor yang masih dapat dianggap sebagai kekuatan dan peluang, dengan tidak menafikan berbagai kelemahan yang dimiliki serta ancaman yang dihadapi KPEK, setelah keempat hal tersebut

teridentifikasi maka disusunlah strategi dan teknik untuk membangkitkan kembali KPEK dengan melibatkan generasi muda (Gen Z) yang memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), di setiap Kelurahan se Kota Bogor, sehingga tumbuh satu Kelurahan satu KPEK berbasis TIK yang tangguh.

4. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang teridentifikasi dan dianalisis oleh Tim *Coaching Clinic* LPPM–UIKA, diekpose kepada Tim pendamping dari Dinas Koperasi, Aparatur Kelurahan, Pengurus KPEK, dan Mahasiswa Peserta KKN di Kampus UIKA Bogor. Diskusi mendalam antara Aparatur Kelurahan, Pengurus KPEK dan Mahasiswa Peserta KKN yang ditugasi pada empat (4) sampai dengan lima (5) KPEK, dan ditindak lanjuti dengan Identifikasi dan Analisis SWOT ke-2 oleh mahasiswa KKN pada 25 KPEK yang menjadi sampel, sehingga ditemukan masalah yang lebih kongkrit. Hasil dari pada Identifikasi berbagai masalah yang dilakukan mahasiswa dijadikan bahan diskusi mendalam antara Aparat Dinas Koperasi, Dosen pembimbing KKN, Tim *Coaching Clinic* dan Dewan Koperasi Daerah Kota Bogor

di Kantor Dinas Koperasi – UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

5. Dari Hasil diskusi mendalam ini dihasilkan kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi-UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dekopinda Kota Bogor dan Tim *Coaching Clinic* LPPM–UIKA Bogor untuk dilakukan pelatihan dan pendampingan terhadap seluruh KPEK di Kota Bogor. Dalam diskusi itu disepakati untuk (a). mengubah dan menyesuaikan Legalitas KPEK, (b). mengubah Kepanjangan dari Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan menjadi Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan, (c). Menghilangkan Unit Simpan Pinjam yang menjadi sumber kemacetan dana pada nasabah, (d). menetapkan KPEK menjadi Koperasi Konsumsi dengan menyesuaikan pada aturan baru yang berlaku sesuai Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku, €. melibatkan generasi muda (Gen Z) yang memahami Teknologi Informasi dan Komputer.
6. Tim *Coaching Clinic* dan Dinas Koperasi–UKM, segera menetapkan jadwal pelatihan serta menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Untuk Para Pengelola KPEK serta merencanakan peremajaan atau mengajak dan menarik Generasi Muda (Gen Z), para anggota Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya untuk aktif menghidupkan/mengembangkan KPEK sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan masing-masing untuk menjadi Koperasi terbaik di Negeri ini.

III. HASIL KEGIATAN

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bogor menganggap bahwa program yang pernah dilakukan bersama dengan Pinbuk itu memiliki banyak nilai tambah dan perlu diulangi dengan memperbaiki beberapa sistem. Maka pada tahun pula dilakukan *Coaching Clinic* untuk para pengurus KPEK yang sebagian besar sudah mati suri di 68 kelurahan, dengan tujuan (Tim *Coaching Clinic* LPPM-UIKA, 2021: 4), sebagai berikut:

1. Membangun motivasi organisasi dengan menerapkan optimalisasi KPEK Kota Bogor.
2. Membangun potensi koperasi KPEK dalam penguatan bisnis.
3. Memberikan pendampingan dalam pemahaman kelembagaan dan penguatan organisasi KPEK Kota Bogor.
4. Sebagai gerakan dukungan inklusi keuangan.

Mengawali kegiatan, *Coaching clinic* LPPM-UIKA melakukan analisis SWOT, diperluas dengan Analisis SWOT yang dilakukan mahasiswa peserta KKN sehingga ditemukan beberapa potensi yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari solusi untuk memperkuat kembali Sumber Daya Manusia pengelola KPEK dan kelembagaan KPEK itu sendiri. Beberapa temuan yang didapat dari SWOT Analysis (Tim *Coaching Clinic* LPPM-UIKA, 2021 : 6-7) adalah sebagai berikut :

Tabel : 1
Hasil Analisis SWOT Pada KPEK di Kota Bogor.

Kekuatan (<i>Strength</i>) Koperasi	Peluang (<i>Opportunity</i>) Koperasi
<ul style="list-style-type: none"> • Menilai Koperasi sangat penting sebagai tempat berorganisasi sekaligus berwirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah (Dinas Koperasi dan UMKM)
<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi memiliki daya dukung lingkungan yang baik untuk pengembangan sosial ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revolusi Industri 4.0

Kekuatan (<i>Strength</i>) Koperasi	Peluang (<i>Opportunity</i>) Koperasi
<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar Koperasi memiliki unit usaha selain simpan pinjam yang menunjang kebutuhan sehari-hari para anggotanya. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemajuan teknologi untuk mempermudah mendapatkan dan menyebarkan informasi
<ul style="list-style-type: none"> Koperasi memiliki pengawasan yang baik (keberadaan dewan pengawas dan dewan penasihat koperasi). 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Bogor sebagai kota tujuan wisata dan pintu gerbang Ibu Kota Negara yang memiliki karakter khusus sebagai penciri.
Kelemahan (<i>Weakness</i>) Koperasi	Ancaman (<i>Threats</i>) Koperasi
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya partisipasi untuk menjadi anggota koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya berbagai sistem koperasi simpan pinjam dengan anggota secara umum
<ul style="list-style-type: none"> Anggota pasif Koperasi lebih banyak dari pada anggota yang aktif 	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan akses pinjaman di bank dengan nominal yang besar
<ul style="list-style-type: none"> <i>Turn over</i> anggota koperasi yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Preferensi yang lebih memilih berbelanja di mini market atau belanja <i>online</i>
<ul style="list-style-type: none"> Modal yang mampu diputar relatif kecil dan kesulitan modal dalam pengembangan unit usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Persaingan yang semakin tinggi di era perdagangan bebas
<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pendukung kelancaran usaha dari aktivitas usaha koperasi seperti sarana komunikasi, transportasi, listrik, komputer dan tempat usaha kurang memadai 	
<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan manajerial pengurus kurang memadai 	
<ul style="list-style-type: none"> Daya saing yang lemah karena belum adakekhasan usaha yang dikelola koperasi 	

Sumber : LPPM – UIKA Bogor Tahun 2021.

Dari hasil Analisis SWOT ditemukan beberapa permasalahan perkoperasian di Kota Bogor, khususnya pada Koperasi Pembiayaan

Ekonomi Kelurahan (KPEK), sebagaimana dilaporkan Tim *Coaching Clinic*– LPPM UIKA Bogor (2021:9) yaitu:

Tabel 4
Permasalahan Koperasi Kota Bogor

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Rendahnya kapasitas SDM koperasi	Rendahnya kualitas SDM Koperasi mengakses <i>Information Communication Technology</i> (ICT) dan jaringan pemasaran
		Masih banyak anggota koperasi tidak paham koperasi
		Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian
	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi	Tingkat Koperasi tidak aktif masih tinggi
		Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip dan nilai koperas
Belum optimalnya kualitas koperasi	Rendahnya kualitas usaha koperasi	Masih banyaknya koperasi yang bergantung pada bantuan pemerintah
		Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan dan layanan bagi anggota
		Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal koperasi dan memajukan usaha koperasi
		Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran

Sumber : LPPM – UIKA Bogor Tahun 2021.

Dari hasil analisis SWOT tersebut, Tim *Coaching Clinic* LPPM–UIKA menyampaikan 2 (dua) rekomendasi untuk penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan, yaitu Pelatihan Manajemen Koperasi, dan Pendampingan Kelembagaan Koperasi. Melengkapi temuan dari SWOT analisis yang dilakukan oleh tim *Coaching Clinic* tersebut dan untuk lebih memperkuat lagi upaya penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan, Dinas Koperasi-UKM, perdagangan dan Penindustrian Kota Bogor untuk yang kedua kalinya mempertajam kerjasama melalui KKN Mahasiswa UIKA, dengan menerjunkan 25 orang mahasiswa peserta KKN yang terbagi menjadi enam (6) kelompok dan ditugasi untuk mendalami permasalahan yang dihadapi oleh KPEK di Kota Bogor, yang diwakili oleh ke 25 KPEK dari 68 KPEK yang ada di Kota Bogor. Untuk menemukan permasalahan tersebut, Mahasiswa peserta KKN melakukan Identifikasi Permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus dari 25 KPEK yang menjadi sampel penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi serta studi dokumentasi. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai indikator dalam SWOT Analisis yang simpulannya sama dengan apa yang dilakukan LPPM-UIKA Bogor, yaitu diperlukannya pelatihan manajemen koperasi dan Pendampingan kelembagaan terhadap KPEK yang ada di Kota Bogor.

Pada awal dirintisnya bersama PINBUK Kota Bogor, sebagai Badan Otonom dari ICMI Orwilsus Bogor, KPEK didampingi KBMT, merupakan Koperasi berbasis sistem Bagi Hasil (Ekonomi Syariah). Oleh karena itu dalam pengembangan dan Kebangkitannya harus tetap berprinsip pada sistem bagi hasil (Ekonomi Syariah) dengan memperluas dan memberikan pendalaman kepada pengurusnya tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pelatihan dan pendampingan yang

harus dilakukan oleh LPPM-Universitas Ibn Khaldun Bogor.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan.

1. Diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat, melalui Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan, untuk:
 - a. Meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya,
 - b. Menunjang Proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat, melalui identifikasi kompetensi yang dimiliki masyarakat, kreativitas, dan ide serta sikap dan perilaku yang lebih baik,
 - c. Mendorong kaum lemah dan rentan untuk memiliki kekuatan atau kemampuan dalam
 - 1) Memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga mereka memiliki kemerdekaan (*freedom*) dalam bidang : (a) politik, (b) ekonomi, (c) pendidikan, (d) dari penyakit, (e) sosial dan budaya
 - 2) Menjangkau sumber-sumber produksi, sehingga mereka mampu meningkatkan usaha dan memperoleh barang/jasa yang diperlukan.
 - 3) Berpartisipasi dalam pembangunan dan penetapan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak

- d. Menjadi menjadi lebih berdaya dalam mewujudkan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi, mengawasi dan/atau memengaruhi berbagai kekuatan sosial dan politik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
 - e. Meningkatkan kemampuan diri agar memiliki kecakapan/keterampilan hidup, pengetahuan dan kekuasaan yang mumpuni agar dapat memengaruhi kehidupan dirinya dan masyarakat.
 - f. Mengarahkan kekuatan rakyat, organisasi dan komunitas untuk menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.
2. Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan merupakan basis dari pada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang harus dimiliki oleh masyarakat pada setiap Kelurahan, sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat Kota Bogor.

Saran

1. Perlu dibangun dan dibangkitkan kembali Eksistensi kelembangaan KPEK melalui pembangunan SDM dan Kelembagaannya, dengan mengubah paradigma ketergantungan kepada pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan sumber daya keuangan dan usaha kecuai melalui kerjasama usaha yang menguntungkan kedua belah pihak.
2. Karena dalam rintisan pertamanya KPEK berprinsip Bagi Hasil yang bersumber pada prinsip ekonomi syariah, maka dalam pengembangan dan kebangkitannya pun jangan berusaha melepaskan diri dari prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Selain diperlukan pelatihan manajemen perkoperasian syariah, perlu pula diadakan secara khusus pelatihan dan pendampingan calon anggota Dewan Syariah untuk setiap KPEK dari masing-masing Kelurahan yang bekerjasama dengan LPPM –UIKA Bogor.

BIBLIOGRAFI

- Halim, Abdul Karim. 2016. *Analisis Pengaruh Program Khusus Pengentasan Kemiskinan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Perubahan Status Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Bogor* (Tesis), Bogor, Universitas Nusa Bangsa.
- Nurhayati, Imas dan Titing Suharti. 2022. Analisis Situasi dan Strategi Pengembangan Kue Tradisional Jipang, FEB-UIKA Bogor, Jurnal Inovator Vol 10 No. 1.
- Sudjana, Djudju. 2010. *Manajemen Program Pendidikan*, Bandung, Falah Production.
- Tim Coaching Clinic LPPM-UIKA. 2021. *Laporan Coaching Clinic Kopersasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan di Kota Bogor*, Bogor, LPPM – UIKA.
- Wawan Sukmawan. 2015. *Capita Selecta Ekonomi Syariah, Bogor*, Yayasan Tarbiyatul Muslimin.

